

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dimasyarakat. Hal ini menyebabkan tuntutan terhadap pendidikan semakin meningkat sehingga menjadi suatu tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan pendidikan dengan selalu tetap memberikan pelayanan yang baik.¹

Semakin meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan, maka lembaga-lembaga pendidikan dihadapkan pada keperluan perluasan sumber daya pendidikan, ketrampilan manajerial dan keorganisasian. Karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan atau tuntutan pendidikan saat ini dan masa yang akan datang. Suatu langkah yang perlu dijalankan untuk menghadapi perluasan adalah dengan menerapkan pengembangan organisasi dalam lembaga pendidikan tersebut.²

Mengacu pada pernyataan tersebut, pada akhir abad 20 di Negara kita terjadi perubahan radikal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya UU No 20 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) pada era otonomi daerah yang mengacu pada UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai perangkat peraturan yang menyertainya, akan menentukan kinerja sistem pendidikan baik pada tataran makro maupun mikro, sehingga keberhasilan desentralisasi pendidikan pada akhirnya akan dan harus diukur melalui perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja pendidikan di tingkat lokal, dengan indikator utama berupa pemerataan, mutu dan akumulasi sumber daya.³

¹ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, IRCiSoD, Jogjakarta, 2010 hal 33

² Ibid Hal 37

³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Desentralisasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu terobosan peningkatan mutu pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan suatu keleluasaan kepada daerah yang mengetahui persis tentang permasalahan pendidikan di tempatnya sebagai pengambil keputusan sehingga meningkatkan daya kreatifitas personil pendidikan terutama sekolah dan menciptakan kesesuaian antara pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang pada akhirnya proses belajar mengajar menjadi efektif.⁴ Implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan adalah adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan, dimana daerah kabupaten, dan kota memiliki kekuasaan dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah mulai dari pengambilan keputusan, pemrograman, implementasi monitoring program dan pengadaan sarana serta prasarana pendidikan. Peran pemerintah pusat dalam hal ini hanyalah menghasilkan kebijaksanaan mendasar dan strategis yakni menetapkan standar dan mengendalikan mutu pendidikan dalam lingkup nasional. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Dalam manajemen sekolah model MBS ini berarti tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, warga sekolah memiliki otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah.

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik.⁵ MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS dimaksudkan meningkatkan otonomi sekolah, menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan, dan mengelola sumber daya yang

⁴ Supriadi, Dedi (2001), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta : Adi Cipta hal 56

⁵ Lock. Cit hal 80

ada untuk berinovasi. MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, staf dan guru yang profesional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat dioptimalkan melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

MBS menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Pertanyaannya adalah kemajuan dalam bidang apa? MBS dapat membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu (a) kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat; dan (b) kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.⁶

Berdasarkan uraian di atas, sekolah sebagai unit penyelenggaraan pendidikan dituntut untuk dapat mandiri dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya, dan harus mampu menghasilkan output pendidikan yang adaptif terhadap tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu upaya sekolah untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui suatu alasan tatanan manajemen, yang berorientasi pada pengembangan sumber-sumber daya yang dimiliki sekolah, yang pada prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban (*responsibility*), wewenang (*authority*), dan tanggung jawab (*accountability*) yang tinggi dalam meningkatkan kinerja terhadap pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) yang memiliki siswa, guru, masyarakat, pemerintah maupun dunia kerja. Hal ini sejalan dengan konsep MBS yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

MBS adalah pengalihan dalam pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemberdayaan sumber –sumber (*resources*) sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan,

⁶ Umaedi (1999), *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta : Dekdikbud

mengendalikan dan mempertanggung jawabkan (*accountability*) kepada setiap yang berkepentingan.⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dalam Manajemen Berbasis Sekolah kontrol pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga sekolah dapat menentukan sendiri terhadap yang diperlukan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi, artinya Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk desentralisasi yang memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan melalui otoritasnya dalam pengambilan keputusan.

Dalam implementasi MBS, kepala sekolah sebagai manajer dalam pendidikan di sekolah tentu akan dihadapkan kepada berbagai tuntutan baik peningkatan pengetahuan, sikap maupun kemampuan terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya. Kepala sekolah dituntut untuk mampu menciptakan kondisi lembaga yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara secara efektif, efisien dan selalu menjaga kesehatan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu langkah untuk mengembangkan kemampuan lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya dengan ketiga ukuran di atas. Akhirnya diharapkan sekolah ini mampu memenuhi tuntutan-tuntutan pendidikan dari konsumen pendidikan, baik yang menyangkut peningkatan kualitas, kuantitas dan relevansi mutu lulusan.⁸

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berencana dan berkala diperlukan adanya standar-standar baik yang bersifat nasional maupun lokal. Standar-standar tersebut mencakup lulusan, isi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS dan pengadaannya merupakan kewenangan serta tanggung jawab sekolah. Sekolah dituntut untuk mampu menerapkan manajemen sarana dan prasarana yang optimal sehingga mampu memberdayakan yang sudah ada dan bahkan melengkapi kebutuhan yang

⁷ Fattah, N. (2000), *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah*, Bandung: CV. Andira Hal: 8

⁸ Ibid Hal 29

belum ada. Sarana dan prasarana merupakan alat yang dapat mendukung dan memfasilitasi realisasi program-program pendidikan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁹

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, penghapusan dan penataan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah. Disamping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru maupun oleh siswa.

Mengacu pada uraian di atas, berdasarkan hasil studi pendahuluan saat ini di MA Al-Falah 2 Nagreg sedang melaksanakan penataan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pada program-program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penataan sarana dan prasarana dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan.

Dalam aspek pengadaan, MA Al-Falah Nagreg belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah, sementara pemerintah sempat mengeluarkan instruksi

⁹ Barnawi, (2012), *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media hal 47

bahwa biaya pendidikan Kabupaten Bandung bebas (gratis) terkait dengan program akselerasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga kepedulian masyarakat terhadap sumbangan dana menjadi berkurang. Peran komite sekolah pun mulai belum optimal, padahal komite sekolah seharusnya menjadi peran utama dalam hal pendanaan untuk melakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan terutama berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana dalam implementasi MBS sehingga mampu meraih keberhasilan dan dapat merealisasikan program-program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Dari aspek pengorganisasian, bahwa kebutuhan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan menyusun skala prioritas, sehingga sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran terpenuhi. Sedangkan dari aspek penggerakan, merupakan kewajiban Kepala Sekolah bersama dalam memberikan motivasi kepada guru untuk memberdayakan sarana prasarana yang sudah tersedia agar digunakan secara optimal dan melakukan inovasi dalam penggunaannya. Adapun dari aspek pengawasan yaitu pengawasan terhadap penggunaan sarana prasarana dilakukan Kepala Sekolah bersama dengan komite Sekolah baik melalui pendekatan langsung maupun melalui laporan-laporan dari pengguna dan dari pengelola.

Fenomena yang terjadi di lapangan (MA Al-Falah II Nagreg) menunjukkan bahwa:

- a. Sebagian besar guru di sekolah mengeluhkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti tidak tersedianya alat peraga, perpustakaan serta sarana prasarana pendukung lainnya yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
- b. Sarana prasarana pembelajaran seperti laboratorium bahasa belum dimiliki oleh sekolah sehingga bila dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan ketrampilan berbicara (*Speaking*) dan ketrampilan mendengar (*Listening*) mengalami kesulitan.
- c. Partisipasi orang tua siswa dan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah masih rendah, hal ini banyak disebabkan oleh kurang optimalnya sekolah dan pengurus komite sekolah dalam menyusun program-program

unggulan yang dapat menarik animo masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

- d. Penggunaan sarana Sekolah (ruang kelas) sebagai Asrama (kobong), sehingga mengurangi ruang kelas yang seharusnya digunakan sebagai sarana sekolah.
- e. Kurangnya perencanaan dalam menyiapkan ruang kelas pada tiap tahun ajaran baru, sehingga menyebabkan siswa harus menggunakan perpustakaan dan laboratorium sebagai ruang kelas.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang manajemen sarana dan prasarana sekolah dalam kaitannya dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, khususnya yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana dalam Implementasi MBS untuk meningkatkan mutu pendidikan di MA Al-Falah II Nagreg.

B. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus Penelitian

Sumber daya sarana dan prasarana merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya sarana prasarana yang optimal, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan tercapai.

Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah dituntut untuk memiliki tingkat kesiapan sumber daya sarana prasarana yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumber daya sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa sumber daya sarana prasarana yang ada harus mahal, akan tetapi sekolah yang bersangkutan dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolahnya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertugas mempersiapkan tenaga-tenaga ahli dalam berbagai bidang yang merupakan sarana utama dalam

pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu sekolah sebagai lembaga pendidikan memerlukan penanganan yang lebih baik dan terarah agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.

Namun untuk menghasilkan lulusan tersebut, terdapat hambatan yaitu masih sering ditemukan sebagian sekolah tidak memiliki laboratorium IPA, perpustakaan, aula atau laboratorium bahasa, ruang kantor guru, ruang guru, dan sebagainya. Berdasarkan anggapan penulis bagaimanapun baiknya sekolah tersebut peningkatan sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan dan sarana merupakan faktor utama yang membatasi proses belajar mengajar.

Usaha yang dapat ditempuh dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan ini selain memperbaiki dan mengoptimalkan proses belajar mengajar, juga memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana. Karena bagaimanapun baiknya sekolah tersebut, peningkatan sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan dan sarana merupakan faktor yang menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, upaya pengembangan sarana dan prasarana yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Permasalahan-permasalahan di atas berdampak pada kegiatan pembelajaran, karena kedudukan sarana prasarana pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat strategis dalam upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Dengan demikian, sarana prasarana yang tersedia dengan cukup memadai dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, maka fokus pembatasan masalah dalam penelitian ini terbatas pada Manajemen Pengembangan sarana dan prasarana dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah di atas, dalam kegiatan pembelajaran, sarana prasarana pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat yang dapat mempertinggi proses pembelajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar siswa.

Ada beberapa alasan mengapa sarana prasarana pembelajaran dapat mempertinggi proses pembelajaran.¹⁰ *Pertama*, berkenaan dengan manfaat sarana prasarana pembelajaran dalam proses pembelajaran siswa, antara lain pembelajaran akan lebih menarik sehingga menimbulkan motivasi belajar, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga serta siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan guru. *Kedua*, berkenaan dengan taraf berfikir siswa. Taraf berfikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berfikir konkret menuju berfikir abstrak, dimulai dari berfikir sederhana menuju ke arah berfikir kompleks. Hal ini mengandung makna bahwa sarana prasarana pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berfikir tersebut sebab melalui sarana prasarana pembelajaran, hal-hal yang abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan.

Ali Hamzah dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran IPA” menyimpulkan bahwa proses dan hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang berarti antara pembelajaran tanpa media pembelajaran dengan pembelajaran menggunakan media atau sarana prasarana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, pengembangan sarana prasarana pembelajaran harus dilakukan dengan tujuan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran yang dilakukan.

Berdasarkan uraian dan fokus pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kepala sekolah

¹⁰ Salusu. J, (1996), *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi*: Jakarta, PT. Gramedia hal 56

melakukan pengembangan sarana dan prasarana dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di MA Al-Falah II Nagreg?

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus pembatasan dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)?
2. Bagaimana *planning* (Perencanaan) Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam Implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg?
3. Bagaimana *actuating* (Pelaksanaan) Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam Implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg?
4. Bagaimana *controlling* (Pengawasan) Pengembangan Sarana Prasarana dalam Implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg?
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala Sekolah dalam pengembangan sarana prasarana dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg?
6. Upaya apa saja yang dilakukan Kepala Sekolah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sarana prasarana dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Teoritis

Sesuai dengan masalah umum di atas, maka secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi program dan hasil dari pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

b. Tujuan Praktis

Berdasarkan tujuan teoritis di atas, maka penelitian ini secara praktis bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

- 1) Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- 2) Perencanaan pengembangan sarana prasarana yang dilakukan kepala sekolah dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg.
- 3) Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan kepala sekolah dalam implementasi di MA Al-Falah II Nagreg.
- 4) Pengawasan pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan kepala sekolah dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg.
- 5) Kendala-kendala yang dihadapi kepala Sekolah dalam pengembangan sarana prasarana dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg.
- 6) Upaya yang dilakukan Kepala Sekolah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sarana prasarana dalam implementasi MBS di MA Al-Falah II Nagreg

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk kepentingan teoritis dalam akselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memperbaiki dan meningkatkan, serta sebagai bahan masukan terhadap kepala sekolah dalam pengembangan sarana prasarana dalam implementasi MBS, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan pendidikan secara praktis.
- 2) Dapat menghasilkan prinsip-prinsip bagi pengembangan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya sarana prasarana dalam implementasi MBS dan kualitas pendidikan

F. Paradigma Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai metode studi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelidiki secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu menentukan, membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan demikian, maka implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS dimaksudkan meningkatkan otonomi sekolah, menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan staf yang profesional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat dioptimalkan melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini sekolah semakin dituntut untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya.

Implementasi MBS menuntut pihak sekolah agar menetapkan visi, misi, tujuan strategi, serta program pendidikan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang memiliki nilai kualitas, efektifitas dan efisiensi serta relevansi yang tinggi. Hal ini menyebabkan pihak sekolah dituntut untuk menganalisis seluruh potensi yang dapat mempengaruhi implementasi MBS, baik mencakup aspek internal maupun eksternalnya sehingga dapat menghasilkan suatu penetapan pengembangan sumber daya pendidikan terutama terkait dengan sarana dan prasarana.¹¹

Realisasi dari pengembangan sumber daya sarana prasarana yang ditetapkan diwujudkan melalui rangkaian program yang direncanakan dan selanjutnya dapat dilakukan secara optimal melalui penerapan fungsi-fungsi

¹¹ Op. Cit hal 79

manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hal ini mengandung makna bahwa pihak sekolah untuk meyakinkan keberhasilannya dalam pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan maka pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan ini dapat diarahkan untuk mengetahui kendala yang dapat diketahui dari hasil yang telah dicapai.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka paradigma penelitian yang penulis sajikan dalam gambar di bawah ini merupakan alur berfikir tentang masalah yang akan diteliti, yang pada akhirnya digunakan sebagai tempat pijakan penelitian.



G. Definisi Operasional

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian di atas, maka agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, di bawah ini penulis kemukakan penjelasan istilah-istilah tersebut:

1. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹²

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.¹³

2. Pengembangan Sarana Prasarana

- a. Pengembangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang muncul setelah rangkaian fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan.

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka pengembangan sumber daya sarana prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan sumber daya sarana prasarana ke tingkat yang lebih baik, lebih luas dan lebih kompleks yang mencakup prosedur pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan.

b. Sarana Prasarana

Sarana prasarana adalah alat yang dapat mendukung dan memfasilitasi realisasi program-program pendidikan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses

¹² Hasibuan, Malayu S.P, (2006), *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara) hal 2

¹³ Manullang, M (2012), *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press hal 5

¹⁴ Sudjana (2000), *Pengantar Manajemen Pendidikan Luar Sekolah*, bandung: Nusantera Press hal 78

pendidikan, khususnya proses pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja, serta alat-alat dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses pembelajaran, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.¹⁵

3. Implementasi MBS

Adalah pemberian otonomi yang lebih kepada Sekolah untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, kaitannya dengan pengembangan sumber daya sarana prasarana maka sekolah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat, dunia usaha dan dunia industri agar kebutuhan terhadap sarana prasarana dapat terpenuhi.

H. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menunjang aspek-aspek yang berhubungan dalam penelitian ini, perlu kiranya disampaikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan rujukan, antara lain:

“Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Santo Aloysius Bandung” penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Kasnin (2005) menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan kualitas pendidikan nilai-nilai budaya mutu harus dijadikan dasar warga sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

“Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 3 Malang” penelitian yang dilakukan oleh Kasmianto (2004)

¹⁵ Barnawi & M Arifin, (2012), *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media hal 79

¹⁶ Mulyana, E (2002) *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Rosda hal 14

menyimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

“Pembinaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dalam pelaksanaan MBS” penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman (2003) menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBS memerlukan dukungan berbagai dimensi, seperti akuntabilitas publik, quality assurance, dan responsibility. Dengan demikian, salah satu faktor utama berhasil tidaknya implementasi MBS pada suatu sekolah tergantung pada upaya kepala cabang dinas pendidikan kecamatan dan kepala sekolah untuk melaksanakan dimensi pendukung tersebut.

“Studi Kelayakan MBS di Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandung”, penelitian yang dilakukan oleh Iis Hindasah (2001) menyimpulkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, khususnya kemampuan Kepala Sekolah menunjukkan adanya perbedaan, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman dari kepala sekolah itu sendiri.

“Indikator dari konsep manajemen pengelolaan pendidikan pada sekolah efektif”, sebuah studi yang dilakukan oleh Edmond (Umaedi 1999) dalam studinya mengungkapkan beberapa indikator sekolah efektif yang merupakan dasar atau awal munculnya konsep MBS.

Dari Studi Edmund ini, terungkap beberapa indikator manajemen sekolah efektif sebagai berikut, (a) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (b) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai; (c) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; (d) adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah; (e) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus; dan (f) komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid dan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, maka seorang guru dituntut aktifitas serta kreatifitasnya untuk dapat mensosialisasikan teori-teori yang diajarkan kepada siswa ke dalam dunia yang sebenarnya. Penguasaan teknik/metode, penggunaan alat peraga, serta pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media dalam proses pembelajaran agar lebih ditingkatkan, sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Mengacu pada uraian di atas, maka posisi penelitian ini merupakan peningkatan objek penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Falah 2 Nagreg, Bandung dengan memadukan pengembangan sarana dan prasarana dikaitkan dengan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang tentunya memiliki perbedaan budaya, persepsi, dan kemampuan manajerial serta daya dukung masyarakat.



I. Sistematika Penulisan

BAB I menguraikan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, paradigma penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan manajemen sarana prasarana dalam implementasi MBS, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan penelitian.

BAB III membahas mengenai prosedur penelitian yang terdiri atas metode dan subjek penelitian, sumber dan teknik penelitian, tahap-tahap penelitian, validitas penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang berisi deskripsi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu.

Demikian uraian bab I, selanjutnya dalam halaman penelitian berikutnya akan penulis uraikan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan manajemen sarana prasarana dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.